



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 04 /PMK.07/2011

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah, perlu mengatur kembali tata cara penyampaian Informasi Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
6. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari penetapan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk investasi vertikal pusat di daerah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

9. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
10. Informasi Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat IKD, adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
11. Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIKD, adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

BAB II

TATA CARA PENYAMPAIAN IKD

Pasal 2

IKD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah mencakup:

- a. APBD;
- b. Perubahan APBD;
- c. Laporan Realisasi APBD Semester I;
- d. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, terdiri dari:
 - 1) Realisasi APBD;
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Arus Kas; dan
 - 4) Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
- f. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan
- g. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Pasal 3

- (1) IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat pula disampaikan Pemerintah Daerah kepada menteri teknis terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 4

Dalam rangka penyelenggaraan SIKD secara nasional, IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

- (1) IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan dalam *softcopy* dan *hardcopy*.
- (2) *Softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. APBD/Perubahan APBD/Realisasi APBD; dan
 - b. Realisasi APBD Semester I.
- (3) *Softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) *Hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ringkasan Pendapatan Pemerintah Provinsi Berdasar Rincian Objek;
 - b. Ringkasan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasar Rincian Objek;
 - c. Ringkasan Belanja Provinsi/Kabupaten/Kota Per Fungsi, Urusan, Organisasi, dan Jenis;
 - d. Rincian Belanja Pegawai Tidak Langsung;
 - e. Ringkasan Pembiayaan;
 - f. Daftar Pinjaman;
 - g. Ringkasan Realisasi APBD Semester I;
 - h. Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - i. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi;
 - j. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - k. Rincian Perhitungan Pihak Ketiga Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - l. Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (5) *Hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan.
- (6) Bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan huruf f berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g disampaikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 6

- (1) *Softcopy* dan *hardcopy* APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disampaikan beserta salinan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) *Softcopy* dan *hardcopy* Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan beserta salinan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (3) *Softcopy* dan *hardcopy* Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d disampaikan beserta salinan Peraturan Daerah mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

- (1) Batas waktu penyampaian APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Batas waktu penyampaian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling lambat 30 hari setelah ditetapkannya Perubahan APBD tahun berjalan.
- (3) Batas waktu penyampaian Laporan Realisasi APBD Semester I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c paling lambat tanggal 30 Juli tahun berjalan.
- (4) Batas waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan.
- (5) Batas waktu penyampaian informasi mengenai Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan huruf f paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (6) Batas waktu penyampaian IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g paling lambat sesuai permintaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB III

PENGENAAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hingga batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan peringatan tertulis kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung setelah tanggal batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan IKD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah DAU yang diberikan setiap bulannya pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif pada penyaluran DAU bulan berikutnya setelah tanggal penetapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan sampai dengan disampaikannya IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11

- (1) Untuk Daerah yang tidak mendapatkan DAU, penetapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah DBH Pajak Penghasilan yang akan disalurkan pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif pada penyaluran DBH Pajak Penghasilan tahap berikutnya setelah tanggal penetapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan disampaikannya IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyampaikan IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Jumlah Dana Perimbangan yang ditunda penyalurannya sebagai akibat dari pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disalurkan pada bulan berikutnya setelah tanggal pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dicabut sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Perimbangan yang ditunda disalurkan kembali sebelum tahun anggaran berakhir.
- (4) Pengenaan sanksi penundaan Dana Perimbangan diberlakukan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri keuangan ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 14

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 9

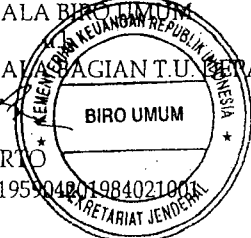
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO

NIP195904801984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
FORMAT SOFTCOPY LAPORAN REALISASI APBD SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN ...

Tahun	Jenis Laporan	Tipe Daerah	Nama Provinsi	Nama Daerah	Kode Akun	Akun	Kode Kelompok	Kelompok	Kode Jenis	Jenis	Jumlah (Rupiah)

Tahun : Diisi dengan tahun laporan
Jenis Laporan : Semester I
Tipe Daerah : Prov / Kab. / Kota
Nama Provinsi : Diisi dengan nama provinsi
Nama Daerah : Diisi dengan nama daerah
Kode Akun : Kode akun pendapatan, belanja & pembiayaan
Akun : Pendapatan / Belanja / Pembiayaan
Kode Kelompok : Kode kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan
Kelompok : Kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan
Kode Jenis : Kode jenis pendapatan, belanja & pembiayaan
Jenis : Jenis pendapatan, belanja & pembiayaan
Jumlah : Diisi dengan jumlah dalam rupiah

Salinan softcopy dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
BIRO UMUM
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

MENTERI KEUANGAN

ttt

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI ...
APBD/PERUBAHAN APBD/REALISASI APBD*
RINGKASAN PENDAPATAN BERDASAR RINCIAN OBJEK
TAHUN ANGGARAN ...

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 04 /PMK.07/2011 TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAJAN	JUMLAH	DASAR HUKUM (NOMOR & TGL PERDA & PERKADA)
4	PENDAPATAN DAERAH		
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
4 1 1	Pajak Daerah		
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor		
4 1 1 01 01	Pajak Kendaraan Bermotor (selain alat berat dan kendaraan di air)		
4 1 1 01 02	Pajak Alat Berat/Beas		
4 1 1 01 03	Pajak Kendaraan di Air		
4 1 1 02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
4 1 1 02 01	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (selain alat berat dan kendaraan di air)		
4 1 1 02 02	Bea Balik Nama Alat Berat/Beas		
4 1 1 02 03	Bea Balik Nama Kendaraan di Air		
4 1 1 03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
4 1 1 04	Pajak Air Permukaan		
4 1 1 05	Pajak Rokok		
4 1 2	Retribusi Daerah		
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum		
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan		
4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Pemsampahan/Kebersihan		
4 1 2 01 03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil		
4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemukiman dan Pengubasan Mayat		
4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		
4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar		
4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
4 1 2 01 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		
4 1 2 01 09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta		
4 1 2 01 10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		
4 1 2 01 11	Retribusi Pengolahan Limbah Cair		
4 1 2 01 12	Retribusi Pelayanan Tern/Tern Ulang		
4 1 2 01 13	Retribusi Pelayanan Pendidikan		
4 1 2 01 14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		
4 1 2 01 15	...dst. (Retribusi Jasa Umum Lainnya/Tambahan)		
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha		
4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
4 1 2 02 02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Perlokolan		
4 1 2 02 03	Retribusi Tempat Pelelangan		
4 1 2 02 04	Retribusi Terminal		
4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir		
4 1 2 02 06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa		
4 1 2 02 07	Retribusi Rumah Pokong Hewan		
4 1 2 02 08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan		
4 1 2 02 09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga		
4 1 2 02 10	Retribusi Penyeberangan di air		
4 1 2 02 11	Retribusi Perjualan Produk Usaha Daerah		
4 1 2 02 12	...dst. (Retribusi Jasa Usaha Lainnya/Tambahan)		
4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu		
4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		
4 1 2 03 02	Retribusi Izin Tempat Perjualan Mirumun Beralkohol		
4 1 2 03 03	Retribusi Izin Gangguan		
4 1 2 03 04	Retribusi Izin Trayak		
4 1 2 03 05	Retribusi Izin Usaha Perikanan		
4 1 2 03 06	...dst. (Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya/Tambahan)		
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
4 1 3 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		
4 1 3 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		
4 1 3 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta		
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
4 1 4 01	Hasil Perjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		
4 1 4 02	Jasa Giro		
4 1 4 03	Pendapatan Bunga		
4 1 4 04	Tuntutan Perbendaharaan		
4 1 4 05	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)		
4 1 4 06	Komis, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah		
4 1 4 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
4 1 4 08	Pendapatan Denda Pajak		
4 1 4 09	Pendapatan Denda Retribusi		
4 1 4 10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		
4 1 4 11	Pendapatan dari Pengembalian		
4 1 4 12	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
4 1 4 13	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
4 1 4 14	Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Perjualan		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM (NOMOR & TGL PERDA & PERKADA)
4 2	DANA PERIMBANGAN		
4 2 1	Dana Bagi Hasil		
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak		
4 2 1 01 01	Pajak Bumi dan Bangunan		
4 2 1 01 02	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21		
4 2 1 01 03	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 WP OPDN		
4 2 1 01 04	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau		
4 2 1 02	Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
4 2 1 02 01	Iuran Izin Usaha Pemudaan Hutan		
4 2 1 02 02	Provisi Sumber Daya Hutan		
4 2 1 02 03	Pertambangan Umum Iuran Telap (Landrent)		
4 2 1 02 04	Pertambangan Umum Royalti		
4 2 1 02 05	Perikanan		
4 2 1 02 06	Pertambangan Minyak Bumi		
4 2 1 02 07	Pertambangan Gas Bumi		
4 2 1 02 08	Pertambangan Panas Bumi		
4 2 2	Dana Alokasi Umum		
4 2 2 01	Dana Alokasi Umum		
4 2 3	Dana Alokasi Khusus		
4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus		
4 2 3 01 01	Pendidikan		
4 2 3 01 02	Kesehatan		
4 2 3 01 03	Infrastruktur Jalan		
4 2 3 01 04	Infrastruktur Irigasi		
4 2 3 01 05	Infrastruktur Air Minum		
4 2 3 01 06	Infrastruktur Sanitasi		
4 2 3 01 07	Prasarana Pemerintahan		
4 2 3 01 08	Kelautan dan Perikanan		
4 2 3 01 09	Pertanian		
4 2 3 01 10	Lingkungan Hidup		
4 2 3 01 11	Keluarga Berencana		
4 2 3 01 12	Kehutanan		
4 2 3 01 13	Sarana Prasarana Pedesaan		
4 2 3 01 14	Perdagangan		
4 2 3 01 15	...dst. (Bidang Lainnya)		
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		
4 3 1	Pendapatan Hibah		
4 3 1 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah		
4 3 1 01 01	Rupiah Murni		
4 3 1 01 02	Penerusan Pinjaman Luar Negeri		
4 3 1 01 03	Penerusan Hibah Luar Negeri		
4 3 1 02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya		
4 3 1 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri		
4 3 1 04	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan		
4 3 1 05	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri		
4 3 2	Dana Darurat		
4 3 2 01	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam		
4 3 2 02	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Peristiwa Luar Biasa		
4 3 2 03	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Alam		
4 3 2 04	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Peristiwa Luar Biasa		
4 3 3	Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus		
4 3 3 01	Dana Penyesuaian		
4 3 3 01 01	Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah		
4 3 3 01 02	Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD		
4 3 3 01 03	Tunjangan Profesi Guru PNSD		
4 3 3 01 04	Dana Insentif Daerah		
4 3 3 01 05	... dst. (Dana Penyesuaian Lainnya)		
4 3 3 02	Dana Otonomi Khusus		
4 3 3 02 01	Dana Otonomi Khusus		
4 3 3 02 02	Kurang Bayar Dana Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur		
4 3 3 02 03	... dst. (Dana Otonomi Khusus Lainnya)		
4 3 4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya		
4 3 4 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi		
4 3 4 02	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
4 3 4 03	Bantuan Keuangan dari Kota		

... / / 20...

Sekretaris Daerah

td

(Nama Lengkap)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ...
APBD/PERUBAHAN APBD/RREALISASI APBD*
RINGKASAN PENDAPATAN BERDASAR RINCIAN OBJEK
TAHUN ANGGARAN ...

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM (NOMOR & TGL PERDA & PERKADA)
4	PENDAPATAN DAERAH		
4 1	Pendapatan Asli Daerah		
4 1 1	Pajak Daerah		
4 1 1 01	Pajak Hotel		
4 1 1 02	Pajak Restoran		
4 1 1 03	Pajak Hiburan		
4 1 1 04	Pajak Reklame		
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan		
4 1 1 06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
4 1 1 07	Pajak Parkir		
4 1 1 08	Pajak Air Tanah		
4 1 1 09	Pajak Sarang Burung Walet		
4 1 1 10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		
4 1 1 11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		
4 1 2	Retribusi Daerah		
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum		
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan		
4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		
4 1 2 01 03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil		
4 1 2 01 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat		
4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		
4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar		
4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
4 1 2 01 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		
4 1 2 01 09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta		
4 1 2 01 10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		
4 1 2 01 11	Retribusi Pengolahan Limbah Cair		
4 1 2 01 12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang		
4 1 2 01 13	Retribusi Pelayanan Pendidikan		
4 1 2 01 14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		
4 1 2 01 15	...dst. (Retribusi Jasa Umum Lainnya/Tambahan)		
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha		
4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaman Kekayaan Daerah		
4 1 2 02 02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan		
4 1 2 02 03	Retribusi Tempat Pelelangan		
4 1 2 02 04	Retribusi Terminal		
4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir		
4 1 2 02 06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa		
4 1 2 02 07	Retribusi Rumah Potong Hewan		
4 1 2 02 08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan		
4 1 2 02 09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga		
4 1 2 02 10	Retribusi Penyeberangan di air		
4 1 2 02 11	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah		
4 1 2 02 12	...dst. (Retribusi Jasa Usaha Lainnya/Tambahan)		
4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu		
4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		
4 1 2 03 02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol		
4 1 2 03 03	Retribusi Izin Gangguan		
4 1 2 03 04	Retribusi Izin Trayek		
4 1 2 03 05	Retribusi Izin Usaha Perikanan		
4 1 2 03 06	...dst. (Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya/Tambahan)		
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
4 1 3 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah/BUMD		
4 1 3 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah/BUMN		
4 1 3 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta		
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		
4 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro		
4 1 4 03	Pendapatan Bunga		
4 1 4 04	Tuntutan Perbendaharaan		
4 1 4 05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
4 1 4 06	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah		
4 1 4 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
4 1 4 08	Pendapatan Denda Pajak		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM (NOMOR & TGL PERDA & PERKADA)
4 1 4 09	Pendapatan Denda Retribusi		
4 1 4 10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		
4 1 4 11	Pendapatan dari Pengembalian		
4 1 4 12	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
4 1 4 13	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
4 1 4 14	Pendapatan dari Angsuran/Ciklan Penjualan		
4 2	Dana Perimbangan		
4 2 1	Bagi Hasil		
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak		
4 2 1 01 01	Pajak Bumi dan Bangunan		
4 2 1 01 02	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21		
4 2 1 01 03	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 WF OPDN		
4 2 1 01 04	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau		
4 2 1 02	Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
4 2 1 02 01	Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan		
4 2 1 02 02	Provisi Sumber Daya Hutan		
4 2 1 02 03	Dana Reboisasi		
4 2 1 02 04	Pertambahan Umum Iuran Tetap (Landrent)		
4 2 1 02 05	Pertambahan Umum Royalti		
4 2 1 02 06	Perikanan		
4 2 1 02 07	Pertambahan Minyak Bumi		
4 2 1 02 08	Pertambahan Gas Bumi		
4 2 1 02 09	Pertambahan Panas Bumi		
4 2 2	Dana Alokasi Umum		
4 2 2 01	Dana Alokasi Umum		
4 2 3	Dana Alokasi Khusus		
4 2 3 01 01	Pendidikan		
4 2 3 01 02	Kesehatan		
4 2 3 01 03	Infrastruktur Jalan		
4 2 3 01 04	Infrastruktur Irigasi		
4 2 3 01 05	Infrastruktur Air Minum		
4 2 3 01 06	Infrastruktur Sanitasi		
4 2 3 01 07	Prasarana Pemerintahan		
4 2 3 01 08	Kelautan dan Perikanan		
4 2 3 01 09	Pertanian		
4 2 3 01 10	Lingkungan Hidup		
4 2 3 01 11	Keluarga Berencana		
4 2 3 01 12	Kehutanan		
4 2 3 01 13	Sarana Prasarana Pedesaan		
4 2 3 01 14	Perdagangan		
4 2 3 01 15	...dst. (Bidang Lainnya)		
4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
4 3 1	Pendapatan Hibah		
4 3 1 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah		
4 3 1 01 01	Rupiah Murni		
4 3 1 01 02	Penerusan Pinjaman Luar Negeri		
4 3 1 01 03	Penerusan Hibah Luar Negeri		
4 3 1 02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lain		
4 3 1 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri		
4 3 1 04	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan		
4 3 1 05	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri		
4 3 2	Dana Darurat		
4 3 2 01	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam		
4 3 2 02	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Peristiwa Luar Biasa		
4 3 2 03	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Alam		
4 3 2 04	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Peristiwa Luar Biasa		
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya		
4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		
4 3 3 01 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor		
4 3 3 01 02	Dana Bagi Hasil Pajak dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
4 3 3 01 03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
4 3 3 01 04	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pajak Air Permukaan		
4 3 3 01 05	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pajak Rokok		
4 3 3 02	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya		
4 3 3 02 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
 APBD/PERUBAHAN APBD/REALISASI APBD*
 RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI, DAN JENIS
 TAHUN ANGGARAN ...

(dalam rupiah)

Fungsi	Urusan	Organisasi/S KPD	BELANJA TIDAK LANGSUNG							BELANJA LANGSUNG			
			Belanja pegawai	Belanja bunga	Belanja subsidi	Belanja hibah	Belanja bantuan sosial	Belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja bantuan keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja tidak terduga	Belanja pegawai	Belanja barang dan jasa	Belanja modal
Pelayanan umum	Perencanaan Pembangunan												
	Operasi Daerah, Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Pertanahan												
	Sistem Kepegawaian												
	Komunikasi dan Informasi												
Partisipasi Masyarakat	Perencanaan Pembangunan												
	Kemudahan dan Kelembutan Layanan Publik												
Keterbukaan dan Transparansi	Kemudahan dan Kelembutan Layanan Publik												
	Perhubungan												
	Ketengahaan												
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah												
	Perumahan Model												
	Kesejahteraan Rakyat												
	Pembudayaan Masyarakat dan Desa												
	Pertanian												
	Kehutanan												
	Energi dan Sumberdaya Mineral												
	Kelautan dan Perikanan												
	Pendidikan												
	Keparamedisan												
Lingkungan hidup	Perumahan												
	Lingkungan Hidup												
Perumahan	Pertanian												
	Pekerjaan Umum												
Kesehatan	Perumahan												
	Kesehatan												
Pariwisata dan budaya	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera												
	Kebudayaan												
Agama	Parwisata												
	Parwisata												
Pendidikan	Pendidikan												
	Kepustakaaan dan Olah Raga												
Perlindungan sosial	Perlindungan Sosial												
	Perlindungan Sosial												



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM (NOMOR & TGL PERDA & PERKADA)
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
4 3 4 01	Dana Penyesuaian		
4 3 4 01 01	Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah		
4 3 4 01 02	Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD		
4 3 4 01 03	Tunjangan Profesi Guru PNSD		
4 3 4 01 04	Dana Insentif Daerah		
4 3 4 01 05	... dst. (Dana Penyesuaian Lainnya)		
4 3 4 02	Dana Otonomi Khusus		
4 3 4 02 01	Dana Otonomi Khusus		
4 3 4 02 02	Kurang Bayar Dana Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur		
4 3 4 02 03	... dst. (Dana Otonomi Khusus Lainnya)		
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya		
4 3 5 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi		
4 3 5 02	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
4 3 5 03	Bantuan Keuangan dari Kota		

... / / 20 ..

Sekretaris Daerah

ttd

(Nama Lengkap)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
APBD/PERUBAHAN APBD/REALISASI APBD*
RINGKASAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ...

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	
6 1 1	SiLPA Tahun Sebelumnya	
6 1 1 01	SiLPA Tahun Sebelumnya	
6 1 2	Pencairan Dana Cadangan	
6 1 2 01	Pencairan Dana Cadangan	
6 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6 1 3 01	Hasil Penjualan Perusahaan Milik Daerah/BUMD	
6 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	
6 1 4 01	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah	
6 1 4 02	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemda Lain	
6 1 4 03	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Bank	
6 1 4 04	Penerimaan Pinjaman Daerah dari LKBB	
6 1 4 05	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah	
6 1 5	Penerimaan Kembali Pinjaman	
6 1 5 01	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah kepada Pemerintah	
6 1 5 02	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah kepada Pemda Lain	
6 1 5 03	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah kepada BUMD	
6 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	
6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	
6 2 1 01	Pembentukan Dana Cadangan	
6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	
6 2 2 01	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	
6 2 2 02	Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
6 2 2 03	Perusahaan Swasta	
6 2 3	Pembayaran Pokok Utang dan Obligasi Daerah	
6 2 3 01	Pembayaran Pokok Utang kepada Pemerintah	
6 2 3 02	Pembayaran Pokok Utang kepada Pemda Lain	
6 2 3 03	Pembayaran Pokok Utang kepada Bank	
6 2 3 04	Pembayaran Pokok Utang kepada LKBB	
6 2 3 05	Pelunasan Obligasi Daerah	
6 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	
6 2 4 01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah	
6 2 4 02	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemda Lain	
6 2 4 03	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	
6 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	

... / / 20...

Sekretaris Daerah

ttd

(Nama Lengkap)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
APBD/PERUBAHAN APBD/REALISASI APBD*
RINCIAN BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN ...

(dalam rupiah)

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH
5				BELANJA DAERAH	
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	
5	1	1		BELANJA PEGAWAI	
5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	
5	1	1	01 01	Gaji	
5	1	1	01 02	Tunjangan	
5	1	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	
5	1	1	03	Belanja Lainnya	

... / ... / 20...

Sekretaris Daerah

ttd

(Nama Lengkap)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
RINGKASAN REALISASI APBD SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN ...

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	Jumlah
1	PENDAPATAN DAERAH	
1. 1	Pendapatan Asli Daerah	
1. 1. 1	Pajak Daerah	
1. 1. 2	Retribusi Daerah	
1. 1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1. 1. 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1. 2	Dana Perimbangan	
1. 2. 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
1. 2. 2	Dana Alokasi Umum	
1. 2. 3	Dana Alokasi Khusus	
1. 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1. 3. 1	Hibah	
1. 3. 2	Dana Darurat	
1. 3. 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	
1. 3. 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1. 3. 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	
1. 3. 6	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
	Jumlah Pendapatan	
2	BELANJA DAERAH	
2. 1	Belanja Tidak Langsung	
2. 1. 1	Belanja Pegawai	
2. 1. 2	Belanja Bunga	
2. 1. 3	Belanja Subsidi	
2. 1. 4	Belanja Hibah	
2. 1. 5	Belanja Bantuan Sosial	
2. 1. 6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov./Kab./Kota dan Desa	
2. 1. 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kab./Kota dan Desa	
2. 1. 8	Belanja Tidak Terduga	
2. 2	Belanja Langsung	
2. 2. 1	Belanja Pegawai	
2. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	
2. 2. 3	Belanja Modal	
	Jumlah Belanja	
	Surplus / (Defisit)	
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3. 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	
3. 1. 1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	
3. 1. 2	Pencairan Dana Cadangan	
3. 1. 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
3. 1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	
3. 1. 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
3. 1. 6	Penerimaan Piutang Daerah	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
3. 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
3. 2. 1	Pembentukan Dana Cadangan	
3. 2. 2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	
3. 2. 3	Pembayaran Pokok Utang	
3. 2. 4	Pemberian Pinjaman Daerah	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	
3. 3	SILPA Tahun Berkenaan	

... / / 20...

Sekretaris Daerah

11d

(Nama Lengkap)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
DAFTAR PINJAMAN
TAHUN ANGGARAN ...

(dalam rupiah)

No	Tahun Penarikan Pinjaman	Sumber Pinjaman	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Masa Pinjaman	Masa Tenggang	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Pagu Pinjaman	Kumulatif Pembayaran Kewajiban	Tunggakan	Saldo Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											

... / / 20...

Sekretaris Daerah

tttd

(Nama Lengkap)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
NERACA

PER 31 DESEMBER TAHUN 20X1 DAN 20X0

	UMALAN	20X1	20X0
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah			
Kas di Bendahara Pengeluaran			
Kas di Bendahara Penerimaan			
Investasi Jangka Pendek			
Piutang Pajak			
Piutang Retribusi			
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara			
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah			
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat			
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya			
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Anggaran			
Bagian Lancar Tunjutan Perbendaharaan			
Bagian Lancar Tunjutan Cans Rugi			
Piutang Lainnya			
Persediaan			
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Nonpermanen			
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara			
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah			
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya			
Investasi dalam Surat Utang Negara			
Investasi dalam Proyek Pembangunan			
Investasi Nonpermanen Lainnya			
Investasi Permanen			
Penyerahan Modal Pemerintah Daerah			
Investasi Permanen Lainnya			
ASET TETAP			
Tanah			
Peralatan dan Mesin			
Gedung dan Bangunan			
Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
Aset Tetap Lainnya			
Konstruksi dalam Pengerjaan			
Akumulasi Penyusutan			
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan			
ASET LAINNYA			
Tagihan Penjualan Anggaran			
Tunjutan Perbendaharaan			
Tunjutan Cans Rugi			
Kemiripan dengan Pihak Ketiga			
Aset Tak Berwujud			
Aset Lainnya			
JUMLAH ASET			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
Utang Bunga			
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat			
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya			
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank			
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank			
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya			
Utang Jangka Pendek Lainnya			
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat			
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya			
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank			
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank			
Utang Dalam Negeri - Obligasi			
Utang Jangka Panjang Lainnya			
JUMLAH KEWAJIBAN			
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR			
Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SLPA)			
Pendapatan yang Ditangguhkan			
Cadangan Piutang			
Cadangan Persediaan			
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek			
EKUITAS DANA INVESTASI			
Diovestasikan dalam Investasi Jangka Panjang			
Diovestasikan dalam Aset Tetap			
Diovestasikan dalam Aset Lainnya			
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang			
EKUITAS DANA CADANGAN			
Diovestasikan dalam Dana Cadangan			
JUMLAH EKUITAS DANA			
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA			

... / / 20...

Sekretaris Daerah

///

(Nama / anakan)

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PROVINSI...



Link Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

Salinan Resmi

Uraian	2021	2020
1 Arus Kas dari Aktivitas Operatif		
2 Arus Kas dari Operasi		
3 Pendapatan Pajak Daerah		
4 Pendapatan Retribusi Daerah		
5 Pendapatan Hasil Pengalihan Kepayaan Daerah yang Dipisahkan		
6 Lain-lain PAD Yang Lain		
7 Dana Bagi Hasil Pajak		
8 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
9 Dana Hibah/Umum		
10 Dana Hibah/Kelembagaan		
11 Dana Hibah/Kelembagaan		
12 Dana Penghasilan		
13 Pendapatan Dana Daerah		
14 Pendapatan Lain-lain		
15 Pendapatan Lain-lain		
16 Jumlah Arus Kas dari Operasi (14 + 15)		
17 Arus Kas dari Operasi		
18 Belanja Pegawai		
19 Belanja Barang		
20 Belanja		
21 Belanja		
22 Belanja		
23 Belanja		
24 Belanja		
25 Belanja		
26 Belanja		
27 Belanja		
28 Belanja		
29 Belanja		
30 Belanja		
31 Belanja		
32 Belanja		
33 Belanja		
34 Belanja		
35 Belanja		
36 Belanja		
37 Belanja		
38 Belanja		
39 Arus Kas dari Operasi		
40 Belanja		
41 Belanja		
42 Belanja		
43 Belanja		
44 Belanja		
45 Belanja		
46 Belanja		
47 Belanja		
48 Belanja		
49 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
50 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
51 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
52 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
53 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
54 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
55 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
56 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
57 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
58 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
59 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
60 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
61 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
62 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
63 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
64 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
65 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
66 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
67 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
68 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
69 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
70 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
71 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
72 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
73 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
74 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
75 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
76 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
77 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
78 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
79 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
80 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
81 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
82 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
83 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
84 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
85 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
86 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
87 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
88 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
89 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
90 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
91 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
92 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
93 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
94 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
95 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
96 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
97 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
98 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
99 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
100 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
RINCIAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA
TAHUN ANGGARAN ...

(dalam rupiah)

No (1)	Uraian (2)	Dipotong/Dipungut (3)	Disetor (4)	Selisih (5)=(3)-(4)
1	Potongan PPh Pasal 21			
2	Potongan PPh Pasal 22			
3	Potongan PPh Pasal 23			
4	PPN			
5	Taperum			
6	Taspen			
7	Askes			
8	... dst.			
	Jumlah			

... / ... / 20...

Sekretaris Daerah

ttd

(Nama Lengkap)

